**BAB I**

**PENDAHULUAN**

# Latar Belakang

Perkebunan menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan merupakan segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan. Urusan perkebunan ini merupakan sektor yang berperan penting bagi pembangunan perekonomian nasional. Sebab pembangunan perkebunan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah, baik dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto, penyediaan tenaga kerja, penerimaan ekspor, bahkan peningkatan pendapatan masyarakat di Indonesia.

Pembangunan perkebunan dalam langkah mengelola perkebunan ini merupakan suatu hal yang tidak bisa bertindak gegabah dan instan untuk melaksanakannya, butuh banyak pertimbangan juga strategi yang harus dipersiapkan secara matang apalagi berhubungan dengan lahan perkebunan Jawa Barat yang luas dan kesejahteraan jasa pihak-pihak perkebunan tersebut, maka dengan potensi perkembangan pembangunan perkebunan ini perlu adanya kerjasama untuk mengelola dengan baik secara bersama-sama oleh masyarakat, pelaku usaha perkebunan serta terutama pihak pemerintah yaitu Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat

Dinas Perkebunan Jawa Barat telah diberikan wewenang oleh pemerintah untuk memfasilitasi dan mendorong kemajuan perkebunan di Jawa Barat dengan diberikan tugas untuk mengelola segala urusan bidang pertanian sub sektor perkebunan mulai dari mengelola, mengurus produksi perkebunan, memfasilitasi bidang perkebunan, membantu mencari solusi untuk hambatan dan kendala perkebunan hingga mengurusi pemasaran dan usaha perkebunan. Dinas perkebunan dalam mendorong kemajuan perkebunan di Jawa Barat perlu adanya konsistensi dan keefektifan dalam melaksanakannya. Pemerintah melalui Dinas perkebunan harus menjaga kualitas kinerja pegawai supaya dapat optimal dalam melaksanakan tanggung jawab yang telah diberikan dan bisa mencapai tujuan yang ditetapkan.

Pembangunan perkebunan akan terus berkaitan dengan sumber daya manusia, karna akan selalu ada tuntutan-tuntutan yang muncul sehingga pentingnya sumber daya manusia terlibat dalam kegiatan pembangunan perkebunan tersebut dengan maksud agar dapat meweujudkan satu per satu tujuan dan sasaran yang telah di rencanakan sebelumnya. Maka dari itu, keberhasilan suatu kegiatan Dinas pemerintahan tidak akan lepas dari bagaimana hasil kualitas kinerja pegawai, Meningkatnya kualitas sumber daya manusia itu akan dapat terlihat dari bagaimana para pegawai menyelesaikan setiap target-target kerja yang telah di tetapkan. Upaya mengelola dan mengembangkan kualitas kinerja individu pada organisasi menjadi hal yang sangat penting dalam membangun dan mengembangkan kemampuan organisasi untuk dapat berperan optimal dalam masyarakat. dalam hal ini, perkembangan organisasi dituntut untuk terus bertumbuh dan bersaing dengan waktu dan jaman dalam memaksimalkan tujuanpelayanan tanpa terkecuali, organisasi pada pemerintahan karena aparatur sipil negara harus mengabdi kepada masyarakat serta terhadap pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan maka pada rasa tanggung jawabnya harus bisa selaras antara tugas pokok fungsi dan target kerja yang telah dibebankan kepadanya.

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan peranan penting bagi kegiatan lembaga atau organisasi khususnya di Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat sebab bagaimanapun kemajuan dan keberhasilan suatu lembaga atau organisasi tidak terlepas dari peran serta kemampuan sumber daya manusia yang profesional. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia akan dilihat dari kinerja pegawai dalam melaksanakan tugas dan peran yang diberikan sesuai dengan tuntutan organisasi. Untuk menjaga kualitas sumber daya manusia terhadap kinerja pegawai perlu dilaksanakan pengukuran atau penilaian kinerja pegawai. Mengukur kinerja pegawai khususnya aparatur sipil negara dapat dilaksanakan sebagai suatu evaluasi organisasi dalam mengetahui adanya keberhasilan atau kegagalan pegawai dalam melaksanakan apa yang telah mereka kerjakan. Kegiatan pengukuran atau penilaian kinerja pegawai ini melalui diharapkan untuk dapat melakukan perbaikan- perbaikan dan meminimalisir kendala-kendala yang terjadi pada kinerja pegawai khususnya kinerja pegawai Sub Bagian Kepegawaian dan Umum di Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat.

Tingkat keberhasilan dari suatu tanggung jawab seseorang dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan sesuai target kerja yang telah ditentukan disebut dengan kinerja pegawai. Kinerja merupakan penampilan, hasil karya personil, baik kualitas, maupun kuantitas penampilan individu maupun kelompok kerja personel, penampilan hasil karya tidak terbatas kepada personel yang memangku jabatan fungsional maupun struktural tetapi juga kepada jabatan fungsional maupun struktural tetapi kepada keseluruhan jajaran personel di dalam organisasi. (Ilyas dalam Sumiati, 2018:17).

Apabila suatu lembaga pemerintahan pada proses pelaksanaan kerjanya baik dan benar maka output yang diharapkan akan mendapatkan hasil yang maksimal. Dapat diketahui bahwasanya masalah utama yang kerap terjadi pada organisasi atau suatu lembaga pemerintahan adalah kinerja pegawai. Fenomena masalah kinerja ini biasanya berkaitan dengan sarana dan prasarana serta kemampuan kinerja pegawai aparatur sipil negaranya masih belum seperti yang diharapkan. Dukungan sarana dan prasarana bagi pelaksanaan kinerja pegawai berpengaruh dalam terlaksananya tujuan yang ditetapkan organisasi.

Mengenai wilayah perkebunan yang dikelola oleh pemerintah nyatanya masih banyak mengalami kendala. Pertama, salah dua fakor alam yang menyebabkan sektor perkebunan mengalami kendala adalah perubahan iklim dan adanya penyebaran kasus virus Covid 19 yang berdampak bagi produktivitas komoditas perkebunan. Tidak hanya itu saja, yang kedua masalah yang signifikan pada proses pengembangan perkebunan yaitu sumber daya manusia. Masalah ini nyatanya diketahui masih banyak kemampuan sumber daya manusia yang kurang kompeten dalam mengelola perkebunan. Maka dari itu, perlu disadari oleh lembaga pemerinta Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat itu sendiri terkait sumber daya manusia harus adanya pengawasan mengenai bagaimana kinerja para pihak hierarki yang ada di Dinas terutama Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh kinerja pegawai. Peneliti menemukan data yang diperoleh saat melakukan observasi dan menyoroti kinerja pegawai pada Sub Bagian Kepegawaian dan Umum di Dinas Perkebunan Jawa Barat bahwa kinerjanya masih belum efektif. Peneliti menemukan masalah yang dihadapi oleh aparatur sipil negara pada Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat yaitu mengenai kinerjanya. Masalah kinerja tersebut masih adanya point-point penting yang belum di perbaiki oleh para aparatur maupun atasannya yang membantu mengarahkan kerja pegawai. Kinerja pegawai ini menyebabkan produktivitas kerja menjadi tidak maksimal, target dan sasaran output pada dinas pun menjadi tidak optimal.

Berdasarkan hasil penjajagan yang dilakukan peneliti pada objek penelitian di Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, ditemukan masalah adanya kinerja pegawai yang masih belum efektif. Berikut adaah hal-hal yang dapat dilihat dalam indikator masalahnya, sebagai berikut :

* + 1. Kurangnya mekanisme pengelolaan kegiatan pelayanan dinas sehingga menyebabkan kinerja belum optimal dan efisien.
		2. Ketepatan waktu, dimana tingkat kehadiran pegawai dalam bekerja masih banyaknya pegawai yang telat masuk kerja dan tidak melaksanakan apel.
		3. Masih banyaknya pegawai yang kurang sadar dalam menaati kedisiplinan pada saat jam bekerja langsung seperti main hp dan mengobrol dengan pegawai lainnya.
		4. Masih kurangnya kemampuan pegawai dalam melakukan tugas dan pekerjaannya dengan baik, karena belum sepenuhnya mampu melaksanakan tugas yang diberikan.

Jadi berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan diatas, permasalahan kinerja pegawai di Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat masih rendah, dalam hal ini peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam dan mengambil judul penelitian sebagai berikut : **“Analisis Kinerja Pegawai pada Sub Bagian Kepegawaian dan Umum di Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat”.**

# Fokus Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang di atas, peneliti memfokuskan penelitian ini terkait Analisis Kinerja Pegawai pada Sub Bagaian Kepegawaian dan Umum di Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan diarahkan pada dimensi pengukuran kinerja pegawai menurut pendapat Bernaddin dan Russel dalam Donni Juni Priansa (2017:55) yang terdiri dari Kualitas, Kuantitas, Ketepatan Waktu, Efektivitas Biaya, Kemampuan Bekerja Tanpa Pengawasan, dan Interpersonal.

# Perumusan Masalah

Berdasarkan penguraian latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kinerja pegawai pada Sub Bagian Kepegawaian dan Umum di Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat?
2. Faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam kinerja pegawai Sub Bagian Kepegawaian dan Umum di Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat?

# Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini sesuai dengan masalah yang dirumuskan yaitu :

1. Untuk mendeskripsikan kinerja pegawai pada Sub Bagian Kepegawaian dan Umum di Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat.
2. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor hambatan dalam kinerja pegawai pada Sub Bagian Kepegawaian dan Umum di Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat.

# Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian diharapkan mamp memberikan kegiatan antara lain :

* + 1. Kegunaan Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi pemikiran dalam pengembangan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundaan, Khususnya terkait kinerja pegawai pada Sub Bagian Kepegawaian dan Umum di Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat.

* + 1. Kegunaan Praktis

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi pemikiran bagii pihak umum yang menaruh perhatian dan minat untuk mengkaji lebih lanjut mengenai Analisis kinerja pegawai pada Sub Bagian Kepegawaian dan Umum di Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat.